

DAMPAK KEBIJAKAN BANTUAN TERNAK SAPI POTONG TERHADAP KESEJAHTERAAN PETERNAK DAN PEREKONOMIAN DAERAH BEKAS TAMBANG BATUBARA SAWAHLUNTO

Dwi Yuzaria dan Ismet Iskandar

Fakultas peternakan Universitas Andalas Padang
Email korespondensi : d.yuzaria@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak kebijakan pemerintah daerah terhadap usaha sapi potong di Kota Sawahlunto. Penelitian dilaksanakan mulai bulan September 2016 hingga bulan November 2016. Menggunakan data primer yang diperoleh dari responden dengan wawancara langsung dan indepth interview dan menggunakan kuisioner. Sementara data sekunder diperoleh dari instansi terkait dengan penelitian. Populasi adalah semua peternak sapi potong yang mendapat bantuan modal dan ang tidak mendapat bantuan modal di kota Sawahlunto. Analisis data menggunakan model Policy Analysis Matrix (PAM). Hasil penelitian menunjukkan Dampak kebijakan bantuan ternak sapi oleh pemerintah Kota Sawahlunto belum meningkatkan daya saing secara kompetitif dan komparatif. Kebijakan pemerintah ini mampu meningkatkan daya saing peternak non bantuan secara kompetitif akan tetapi belum secara komparatif. Secara keseluruhan keuntungan usaha sapi potong non bantuan lebih tinggi dibandingkan usaha yang mendapatkan bantuan modal. Kebijakan pemerintah dengan subsidi modal pada usaha sapi potong di kota Sawahlunto menjadikan peternak sapi potong yang mendapat bantuan menjadi mandiri .

Kata kunci : Kebijakan bantuan ternak sapi potong, peningkatan pendapatan, daya saing

1. PENDAHULUAN

Ketersediaan ternak sapi di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat dari sisi *supply* dan *demand*. Pertumbuhan populasi, produksi dan produktivitas ternak sapi yang rendah, serta diperparah dengan meningkatnya pemotongan ternak sapi betina produktif atau sapi muda, menyebabkan supply daging tidak dapat mencukupi permintaan yang cenderung meningkat. Upaya memenuhi kekurangan ternak sapi menghadapi beberapa kendala, antara lain belum mendapat dukungan secara penuh dari Pemerintah Pusat (Direktorat Jenderal Peternakan Departemen Pertanian). Meskipun Propinsi Sumatera Barat sudah ditetapkan sebagai kelompok 18 Provinsi sentra sapi potong yang difokuskan dalam upaya Program Kecukupan Daging (PKD) tahun 2014. Kendala lain, belum mendapat dukungan swasta karena usaha pembibitan ternak sapi sebagai agribisnis yang tidak menguntungkan (*not-profitable*) dan masa pengembalian investasi yang lama (*long-run investment*).

Oleh karena itu, Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan kebijakan berupa program bantuan ternak sapi kepada peternak atau kelompok ternak dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan ternak atau daging sapi, mensejahterahkan peternak sapi dan sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Sumatera Barat. Menurut Pearson dkk (2005), suatu kebijakan yang efektif akan mengubah perilaku produsen, pedagang, dan

konsumen serta menciptakan *outcome* baru dari sebuah perekonomian. Dalam pelaksanaannya Program bantuan ternak sapi ini menghadapi kendala-kendala diantaranya : 1) kesiapan instansi di tingkat Kabupaten: kesiapan bibit, kesiapan kelompok penerima, termasuk ketidaktepatan penerima; dan (2) keterlambatan pelaksanaan APBD.

Kota Sawah Lunto, merupakan daerah yang mendapatkan bantuan ternak sapi terbanyak. Eksploitasi batubara di kota Sawahlunto yang terus menerus seiring waktu produksi batubara akhirnya berkurang dan usaha milik Negara yaitu PT. Tambang Batubara Bukit Asam Unit Produksi Ombilin (PT. BA-UPO) ditutup pada tahun 2001. Kondisi ini menyebabkan penurunan pada pendapatan masyarakat. Pemerintah kota Sawahlunto berusaha memperbaiki kondisi ini melalui kegiatan ekonomi kerakyatan, yang bergerak di sektor pertanian. Adapun jenis usahanya terdiri dari sektor perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Berdasarkan konsep beberapa macam komoditi yang dapat diusahakan secara bersamaan dan saling menguntungkan, maka lahirlah program usahatani terpadu (UTT) dengan Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor 19 tahun 2007.

Program bantuan ternak sapi yang diberikan kepada bekas pekerja tambang batubara tidak membuahkan hasil yang diharapkan, pengembalian bantuan bergulir kepada peternak lain mengalami kegagalan total dari 100 persen bantuan yang diberikan hanya 20 persen yang melakukan pengembalian, namun tidak sepenuhnya. Diduga kegagalan ini disebabkan karena kurangnya pengontrolan yang dilakukan pemerintah dan moral hazard para penerima bantuan. Agar dapat di berikan solusi untuk mengatasi kegagalan ini, maka diperlukan penelitian tentang dampak bantuan ternak sapi ini terhadap peningkatan pendapatan dan perekonomian daerah Kota Sawah Lunto. Untuk melihat seberapa jauh program bantuan ini berhasil, maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak kebijakan bantuan ternak sapi terhadap kesejahteraan peternak sapi yang mengikuti program dan peternak sapi yang tidak mengikuti program di Kota Sawah Lunto dan mengkaji dampak kebijakan bantuan ternak sapi terhadap perekonomian daerah Kota Sawah Lunto.

Kebijakan pembangunan pertanian ialah keputusan dan tindakan pemerintah untuk mengarahkan, mendorong, mengendalikan dan mengatur pembangunan pertanian guna mewujudkan tujuan tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan petani saja tetapi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia (Simatupang, 2003). Menurut Pearson dkk. (2005), kebijakan (*policies*) terdiri atas berbagai instrumen pemerintah yang dapat digunakan untuk merubah *outcome* perekonomian. Sebuah kebijakan yang efektif akan mengubah perilaku produsen, pedagang dan konsumen serta menciptakan *outcome* baru dari sebuah perekonomian. Kebijakan yang mempengaruhi sektor pertanian : 1). kebijakan harga; 2). kebijakan makro ekonomi; dan 3). kebijakan investasi publik.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kerangka analisis kebijakan adalah kerangka analisis kebijakan Timbergen. Penelitian yang pernah dilakukan oleh YUSDJADKK (2004) menemukan beberapa penyebab kegagalan kebijakan program peningkatan produksi daging sapi yaitu a) kebijakan program peningkatan produksi daging sapi yang dirumuskan tidak disertai dengan rencana operasional yang rinci, perumusan program hanya terbatas pada judul dan sasaran tetapi tidak jelas bagaimana sasaran hendak dicapai; b) program-program peningkatan produksi daging sapi yang dibuat pemerintah bersifat nasional (*top down*) dan berskala kecil dibandingkan dengan sasaran yang ingin dicapai; c) strategi implementasi program peningkatan produksi daging sapi disamaratakan, tidak memperlakukan wilayah unggulan akibatnya program menyebar dalam ukuran yang sangat kecil; dan d) implementasi program-program peningkatan produksi daging sapi tidak dilaksanakan dengan suatu metode yang memungkinkan evaluasi dampak program itu berhasil atau tidak, program-program itu tidak bisa disesuaikan.

Model PAM (*Policy Analysis Matrix*) dapat digunakan untuk menganalisis efisiensi ekonomi dan besarnya insentif atau investasi pemerintah serta dampaknya pada sistem komoditas pada aktivitas usahatani, pengolahan dan pemasaran secara keseluruhan dengan sistematis. Dibandingkan dengan menghitung efisiensi ekonomi dan insentif investasi pemerintah yang komersial, maka dengan menggunakan PAM penghitungannya dapat dilakukan secara menyeluruh dan sistematis, yaitu mulai dari input dan output yang keluar, nilai efisiensi ekonomi dan besarnya insentif investasi pemerintah, nilai keuntungan, efisiensi privat dan sosial, besarnya transfer input, transfer faktor, transfer bersih, transfer output diantara produsen, konsumen dan pedagang perantara dan seterusnya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan penelitian survei, menggunakan data primer dan sekunder. Responden ditetapkan secara kuota sebanyak 40 responden yang ikut program dan yang tidak ikut program, dipilih menggunakan *multi-stage cluster random sampling*. Metoda Analisis yang digunakan adalah *Policy Analysis Matrix* (PAM). PAM dapat menganalisis efisiensi ekonomi dan besarnya insentif atau intervensi pemerintah serta dampaknya pada sistem komoditas pada aktivitas usahatani, pengolahan dan pemasaran secara keseluruhan dengan sistematis. Asumsi-asumsi yang digunakan dalam PAM adalah: 1) Penghitungan berdasarkan *private cost* yaitu harga yang benar-benar terjadi dan diterima oleh produsen dan atau konsumen atau harga yang terjadi setelah adanya kebijakan pemerintah. 2) Penghitungan berdasarkan *social cost* yaitu harga pada kondisi pasar persaingan sempurna atau harga yang terjadi bila tidak ada (intervensi) atau kebijakan pemerintah. Pada komoditas tradabel, harga sosial adalah

harga yang terjadi di pasar internasional. 3) Output bersifat tradabel sedangkan input dapat dipisah berdasarkan komponen *tradable* (asing) dan non *tradable* (faktor domestik). Alat analisis PAM menggunakan Matriks pada Tabel 1.

Tabel 1. Formulasi Model Policy Analysis Matrix (PAM)

Komponen	Penerimaan	Biaya		
		Input diperdagangkan	Faktor domestic	Keuntungan
Harga privat	A	B	C	D ¹⁾
Harga social	E	F	G	H ²⁾
Dampak Divergensi	I ³⁾	J ⁴⁾	K ⁵⁾	L ⁶⁾

Sumber : Pearson dkk., (2005)

Keterangan :

$$1) \text{ Keuntungan Privat (D)} = (A - (B + C)) \quad 2) \text{ Keuntungan social (H)} = (E - (F + G))$$

$$3) \text{ Transfer Output (I)} = A - E \quad 4) \text{ Transfer Input (J)} = B - F$$

$$5) \text{ Transfer Faktor (K)} = C - G \quad 6) \text{ Transfer bersih (L)} = D - H = (I - (J + K))$$

Dengan menggunakan matriks diatas dapat dihitung :

1. **Private Cost Ratio (PCR)**. PCR merupakan indikator keunggulan kompetitif. $PCR < 1$ dan makin kecil, artinya komoditas ternak sapi memiliki keunggulan kompetitif.
2. **Domestic Cost Ratio (DCR)** DRC merupakan indikator keunggulan komparatif. $DRC < 1$ maka usaha ternak sapi memiliki keunggulan komparatif
3. **Output Transfer (OT)** OT menunjukkan dampak kebijakan pemerintah yang dapat diterapkan pada output. OT positif menunjukkan masyarakat membeli dan produsen menerima dengan harga yang lebih tinggi. OT masyarakat membeli dan produsen menerima dengan harga yang lebih rendah.
4. **Nominal Protection Coefficient on Tradable Output (NPCO)**
NPCO menunjukkan dampak kebijakan (kegagalan pasar yang tidak dikoreksi oleh kebijakan efisien) $NPCO > 1$, kebijakan pemerintah sistem komoditas ternak sapi diproteksi. $NPCO < 1$, usaha ternak sapi tidak diproteksi
5. **Transfer Input (IT)**, adanya kebijakan pemerintah yang diterapkan pada input tradable. $IT < 0$ negatif menunjukkan pemerintah menerapkan subsidi, $IT > 0$ (positif) menunjukkan penerapan kebijakan tarif impor.
6. **Nominal Protection Coefficient on Tradable Input (NPCI)**, $NPCI > 1$, pemerintah menaikkan harga input tradable di pasar domestik di atas harga efisiensinya (harga dunia). Karena kebijakan pemerintah yaitu pajak. $NPCI < 1$, pemerintah menurunkan harga input tradable di harga pasar domestik di bawah harga efisiensinya. (harga dunia), karena kebijakan pemerintah yaitu subsidi.

7. **Transfer Factor (TF)**, TF menunjukkan adanya kebijakan pemerintah terhadap produsen dan konsumen yang berbeda dengan kebijakan pada input tradable. Investasi pemerintah untuk input domestik dilakukan dalam bentuk kebijakan subsidi. Jika nilai TF positif berarti ada kebijakan pemerintah yang melindungi produsen pada faktor domestik dengan pemberian subsidi.
8. **Effective Protection Coefficient (EPC)**, $EPC > 1$, pemerintah menaikkan harga output atau input yang diperdagangkan di atas harga efisiensinya, artinya pemerintah yang melindungi produsen domestik berjalan secara efektif. $EPC < 1$, kebijakan melindungi produsen tidak efektif
9. **Net Transfer (NT)**, NT merupakan selisih antara keuntungan bersih yang benar-benar diterima produsen dengan keuntungan bersih sosialnya. Nilai $NT > 0$, menunjukkan tambahan surplus produsen dan $NT < 0$, menunjukkan pengurangan surplus produsen karena kebijakan.
10. **Profitability Coefficient (PC)**, menunjukkan dampak keseluruhan dari kebijakan pemerintah $PC > 1$, berarti secara keseluruhan kebijakan pemerintah memberikan insentif kepada produsen. $PC < 1$, menunjukkan kebijakan pemerintah membuat keuntungan yang diterima produsen lebih kecil dibandingkan tanpa ada kebijakan. Berarti produsen harus mengeluarkan sejumlah dana kepada masyarakat atau konsumen.
11. **Subsidy Ratio to Producer (SRP)**, $SRP < 0$ negatif menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah menyebabkan produsen mengeluarkan biaya produksi lebih besar dari *opportunity cost*. $SRP > 0$ positif, kebijakan pemerintah menyebabkan produsen mengeluarkan biaya produksi lebih kecil dari *opportunity cost*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Sawahlunto merupakan salah satu kota dengan aktivitas ekonomi dan sosialnya didominasi oleh kegiatan pertambangan batubara, semua perikehidupan masyarakat sangat tergantung dengan aktivitas tersebut. Karena eksploitasi batubara yang terus menerus seiring waktu produksi batubara akhirnya berkurang dan usaha milik Negara yaitu PT. Tambang Batubara Bukit Asam Unit Produksi Ombilin (PT. BA-UPO) ditutup pada tahun 2001. Kondisi ini menyebabkan penurunan pada pendapatan masyarakat. Pemerintah kota Sawahlunto berusaha memperbaiki kondisi ini melalui kegiatan ekonomi kerakyatan melalui program usahatani terpadu (UTT) dengan Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor 19 tahun 2007. Program UTT memberikan Pinjaman modal usaha untuk pengembangan sapi/kerbau yang wajib dikembalikan dan akan dipinjamkan kembali kepada peternak lain.

Dampak kebijakan bantuan UTT dapat dilihat penghitungan keuntungan. Apakah kebijakan pemberian bantuan modal untuk peternakan sapi potong mampu memberikan keuntungan bagi peternak. Alat analisa Policy Analysis Matrix (PAM) dapat menjelaskan secara komprehensif dengan Hasil perhitungan PAM dipaparkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Perhitungan PAM pada usaha sapi potong dengan program UTT dan non UTT

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Tradable	Domestik	
Peserta UTT				
Nilai Finansial	6,206,705	2,288,334	2,970,304	948.067
Nilai ekonomi	5,896,370	2,373.881	2,673,274	849,215
Dampak kebijakan	310,335	-85,547	297,030	98,852
Non UTT				
Nilai Finansial	32,562,068	3,249,068	17,141,367	12,171,633
Nilai ekonomi	30,933,965	2,599,747	15,255,817	13,078,401
Dampak kebijakan	1,628,103	649,321	1,885,550	-906,768

Sumber :data Penelitian diolah

Keuntungan privat peternak. Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa peternak proram bantuan modal UTT memperoleh keuntungan financial baik pada harga privat maupun pada tingkat harga social. Pada tingkat harga privat keuntungan yang diperoleh peserta program UTT sebesar Rp 948.067 yang lebih besar dibanding dengan keuntungan pada tingkat harga sosial sebesar Rp 849,215. Kondisi ini menunjukkan bahwa program bantuan modal UTT berdampak positif bagi peternak peserta UTT dalam meningkatkan penghasilan dalam rumah tangga.

Keuntungan sosial merupakan indikator efisiensi (*efficiency*) sistem komoditas. Nilai keuntungan sosial usaha peternakan sapi potong UTT dan non UTT > 0. Artinya, usaha peternakan ini sudah efisien pada tingkat harga sosial (harga yang akan menghasilkan alokasi terbaik dari sumberdaya dan dengan sendirinya menghasilkan pendapatan yang tinggi. Pada tingkat harga sosial keuntungan yang diperoleh lebih kecil menunjukkan bahwa tanpa kebijakan peserta program UTT menerima keuntungan yang lebih kecil. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah masih harus memberikan subsidiya agar usaha peternakan dapat memberikan pendapatan yang lebih tinggi.

Kebijakan Bantuan modal UTT juga berdampak terhadap peternak non UTT, baik pada harga privat maupun pada tingkat harga social yaitu sebesar Rp 12,171,633 pada harga privat dan Rp 13,078,401 pada harga social. Untuk peternak yang tidak mendapatkan bantuan modal UTT (non UTT), keuntungan yang diperoleh lebih tinggi, karena peternak lebih banyak

menggunakan sumberdaya domestik seperti tenaga kerja dalam keluarga yang dimanfaatkan sebagai tenaga kerja tidak dibayar. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan sudah dijalankan sesuai dengan juknisnya yang mempersyaratkan penerima bantuan haruslah peternak miskin yang tidak mampu menambah jumlah sapi. Sementara responden non UTT yang terpilih merupakan peternak yang cukup mampu menambah skala usahanya terbukti dari kepemilikan sapi dalam jumlah yang lebih besar.

Analisis Efisiensi Ekonomi

Tingkat efisiensi pengusahaan suatu komoditi akibat adanya kebijakan pemerintah dapat dilihat dari dua indikator yaitu keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif. Kebijakan bantuan UTT bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang kehilangan pendapatan dari hasil tambang batubara. Kebijakan pemerintah ini menimbulkan dampak terhadap kinerja usaha sapi potong di kota Sawahlunto. Ukuran dampak dan kebijakan pemerintah dalam matrix PAM adalah : (1) keuntungan privat, (2) keuntungan sosial, (3) pengaruh divergensi (transfer input, transfer output, transfer faktor dan transfer bersih), (4) rasio biaya privat, (5) rasio biaya sumberdaya domestik, (6) koefisien proteksi output nominal, (7) koefisien proteksi input nominal, (8) koefisien proteksi efektif, (9) koefisien keuntungan dan (10) rasio subsidi produsen. Hasil perhitungan ukuran dampak dipaparkan Tabel 3.

Tabel 3. Indikator analisis kebijakan bantuan UTT pada usaha ternak sapi potong di Kota Sawahlunto dengan model PAM

Indikator	Rumus	Peserta Program UTT	Peternak Non UTT
Keuntungan individual (Rp)	$A - (B+C)$	948.067	12,171,633
Keuntungan sosial (Rp)	$E - (F+G)$	849,215	13,078,401
DRCR (%) = <i>domestic resource cost ratio</i>	$G/(E - F)$	0.76	0.54
PCR (%) = <i>profit cost ratio</i>	$C/(A - B)$	0.76	0.58
NPCO (%) = <i>Nominal Protection Coefficient on Tradable Output</i>	A/E	1.05	1.05
NPCI (%) = <i>Nominal Protection Coefficient on Tradable Input</i>	B/F	0.96	1.25
EPC (%) = <i>Effective Protection Coefficient</i>	$(A-B)/(E-F)$	1.11	1.03
PC (%) = <i>profitability coefficient</i>	D/H	1.12	0.93
SRP = Subsidy Ratio to Produce	L/E	0.02	(0.03)
OT = <i>output transfer</i>	$A-E$	310,335	1,628,103
IT = <i>input transfer</i>	$B-F$	-85,547	649,321
NT = <i>Net transfer</i>	$D-H$	98,852	-906,768

Output transfer. Pada penelitian ini usaha sapi potong peternak peserta UTT dan non UTT menghasilkan nilai transfer output yang positif. Hasil ini menunjukkan bahwa terjadi transfer dari masyarakat (konsumen pedagang dan penjagal) kepada produsen (peternak sapi UTT dan non UTT), artinya masyarakat atau konsumen membeli komoditas sapi potong baik yang berasal dari peserta UTT maupun non UTT dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang seharusnya, dan produsen atau peternak sapi potong menerima harga sapi dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang seharusnya. Artinya peternak sapi potong menerima pendapatan Rp 948.067 lebih besar daripada seharusnya. Sedangkan usaha peternakan non UTT menerima pendapatan Rp 12,171,633 lebih kecil daripada seharusnya atau lebih kecil daripada tanpa ada kebijakan pemerintah. Keadaan ini disebabkan karena harga komoditas daging di pasar domestik lebih tinggi daripada harga komoditas daging sapi di pasar dunia. Perbedaan penerimaan privat dan penerimaan social disebut dengan *output transfer*, yang dihitung dengan rumus $I = A - E$. Pada penelitian ini untuk peternak peserta UTT mempunyai nilai selisih (divergensi = I) positif sebesar Rp 310,335,- menunjukkan bahwa pemberian bantuan ternak sapi potong memberikan keuntungan. Begitu juga dengan peternak non UTT mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1,628,103, karena terjadinya kenaikan harga output di pasar. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemberian bantuan sapi potong dalam program UTT telah ikut menaikkan keuntungan peternak non UTT.

Koefisien Proteksi Output Nominal (NPCO)

NPCO menunjukkan seberapa besar harga privat berbeda dengan harga sosial (Pearson et al , 2005). Hasil penelitian menunjukkan NPCO sebesar 1,05 (NPCO>1) artinya kebijakan pemerintah memberikan bantuan modal sapi potong menyebabkan harga yang diterima peserta UTT lebih tinggi sebesar 5 persen di atas harga yang seharusnya, artinya terjadi peningkatan pendapatan atau transfer output kepada peternak baik peserta UTT maupun non UTT atau peternak mendapatkan insentif untuk meningkatkan produksinya.

Input Transfer.

Berdasarkan hasil analisis, transfer input ditunjukkan dengan nilai IT negative (-85,547). Nilai tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah pada input tradable menguntungkan produsen sebesar Rp 85,547. Artinya subsidi atas input bakalan memberikan transfer pendapatan dari produsen input kepada peternak.

Koefisien Proteksi Input Nominal (NPCI)

Hasil penelitian menunjukkan Nilai NPCI>1, adalah 0.96. Nilai ini menunjukkan adanya kebijakan subsidi berupa bantuan modal sapi potong. Pada peternak non UTT nilai NPCI adalah sebesar 1,25 > 1, hal ini menunjukkan bahwa peternak non UTT tidak mendapatkan subsidi input berupa sapi potong, sehingga bagi peternak non UTT, terjadi distorsi

harga input yang diterima peternak lebih mahal dari yang seharusnya. Kondisi ini sebenarnya merugikan peternak non UTT namun karena mereka mempunyai cukup modal untuk menambah input, maka keuntungan yang diterima tetap lebih besar dari peternak peserta UTT.

Dampak Gabungan Kebijakan Pemerintah Terhadap Input-Output

Dapat dilihat dari angka Koefisien Proteksi Efektif (EPC), Transfer Bersih (NT), Koefisien Keuntungan (PC), dan Rasio Subsidi bagi Produsen (SRP). Hasil perhitungan menunjukkan angka EPC yang lebih besar dari 1 yaitu sebesar 1,11 pada peternak peserta UTT dan 1,03 pada peternak non UTT. Peternak peserta UTT dan non UTT memperoleh fasilitas proteksi dari pemerintah karena harga privat output lebih besar dari harga bayangannya dan peternak membeli input tradable lebih rendah dari harga bayangannya. Sementara Transfer bersih (Net Transfer) menunjukkan besarnya tambahan surplus produsen. Hasil penelitian nilai transfer bersih di lokasi penelitian adalah positif 98,852 yang berarti adanya penambahan surplus produsen sebesar Rp 98,852 per ekor, sedangkan pada peternak Non UTT nilai NT nya sebesar negative (906,768) yang menurunkan surplus peternak non UTT sebesar Rp 906,768 per ekor pada kondisi adanya kebijakan pemerintah dan distorsi pasar saat ini.

Koefisien Keuntungan (PC) menunjukkan dampak insentif dari semua kebijakan output, kebijakan input, dan input domestik (net policy transfer). Nilai PC yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah 1,12 yang lebih besar dari 1 ($PC > 1$), berarti peternak peserta UTT mendapatkan keuntungan sebesar 12% karena adanya bantuan modal UTT. Sedangkan pada peternak non UTT nilai PC adalah sebesar 0,93 atau lebih kecil dari satu yang berarti peternak non UTT mengalami kerugian sebesar 7% karena adanya intervensi atau kebijakan dari pemerintah. Angka tersebut menunjukkan keuntungan privat yang diterima peternak lebih kecil daripada keuntungan bersih sosialnya.

Rasio Subsidi bagi Produsen (SRP) hasil penelitian menunjukkan nilai positif 0,02 untuk peserta UTT ($SRP > 0$), hal ini menunjukkan bahwa bantuan modal sapi potong menyebabkan peternak mengeluarkan biaya lebih besar dari seharusnya, sementara peternak non UTT mempunyai nilai SRP negatif 0,03 ($SRP < 0$). Ini berarti bahwa kebijakan pemerintah yang berlaku selama ini menyebabkan peternak non UTT mengeluarkan biaya produksi lebih rendah 3 persen dari biaya opportunity cost untuk berproduksi. Jadi secara keseluruhan kebijakan pemerintah merugikan peternak sapi potong, hal ini dapat dilihat dari tidak mampunya peternak mengembalikan modal yang di pinjamkan, sementara peternak non UTT dapat meningkatkan pendapatannya sebesar 3 persen.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Kebijakan bantuan ternak sapi melalui Program Bantuan Modal UTT di Kota Sawahlunto berdampak positif bagi peternak penerima bantuan dan juga memberikan dampak yang positif terhadap tingkat keuntungan peternak non UTT yang dilihat dari indikator tingkat keuntungan baik keuntungan usaha individual maupun tingkat keuntungan berdasarkan harga social dan sudah berproduksi secara efisien.
2. Kebijakan bantuan ternak sapi ini memberikan dampak yang beragam terhadap perekonomian masyarakat dilihat dari beberapa indikator *Policy Analysis Matrix*. Dampak kebijakan bantuan ternak sapi oleh pemerintah Kota Sawahlunto belum meningkatkan daya saing secara kompetitif dan komparatif. Kebijakan pemerintah ini mampu meningkatkan daya saing peternak non bantuan secara kompetitif akan tetapi belum secara komparatif. Secara keseluruhan keuntungan usaha sapi potong non bantuan lebih tinggi dibandingkan usaha yang mendapatkan bantuan modal. Kebijakan pemerintah dengan subsidi modal pada usaha sapi potong di kota Sawahlunto menjadikan peternak sapi potong yang mendapat bantuan menjadi mandiri

Saran

Kebijakan yang diterapkan sudah baik namun karena adanya kebijakan lain dan distorsi pasar yang terjadi maka disarankan kepada pemerintah daerah untuk lebih banyak mengkaji dan menganalisis kebijakan-kebijakan yang diperlukan agar kinerja produksi usaha peternakan sapi potong dengan sistem terpadu dapat meningkatkan perekonomian lebih baik lagi. Perlu adanya kontrol oleh pemerintah terhadap jalannya budidaya sehingga diperoleh peningkatan jumlah populasi ternak.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Basuno, E. dan Suhaeti, R.N. 2007. Analisis Bantuan Pinjaman Langsung Masyarakat (BPLM) : Kasus Pengembangan Usaha Ternak Sapi di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*. Volume 5 No. 2, Juni 2007 : 150-166
- Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat. 2007. Percepatan Swasembada Daging Sapi 2012 Menuju Surplus Produksi 2015 : *Road Map* Pengembangan Sapi Potong Provinsi Sumatera Barat. Sumatera Barat
- Ellis, F.,1992. *Agricultural Policies in Developing Countries*. Cambridge University Press, Cambridge.
- Pearson, S. Carl, G. Bahri, S. 2005. *Applications of the Policy Analysis Matrix in Indonesian Agriculture*, Yayasan Obor Indonesia Jakarta.
- Simatupang, P. 2003. Analisis Kebijakan : Konsep Dasar dan Prosedur Pelaksanaan. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*. Volume 1 No. 1., Maret 2003 : 1-21

- Yusdja, Y., Sajuti, R., Suhartini, S.H., Sadikin, I., Winarso, B. dan Muslim, C. 2004. Pemantapan program dan Strategi Kebijakan Peningkatan Produksi Daging Sapi. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Penelitian Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
- Yusdja, Y dan Ilham, N. 2007. Suatu Gagasan Tentang Peternakan Masa Depan dan Strategi Mewujudkannya. Forum Penelitian Agro Ekonomi. Volume 25 No. 1, Juli 2007 : 19 - 28